

Evaluasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Persediaan PSAP No. 5 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara

Evaluation Of The Application Of Inventory Accounting Treatment PSAP No. 5 At The North Minahasa District Health Office

Cendy A. Alouw¹, Harijanto Sabijono², Steven J. Tangkuman³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia
cendyalouw064@student.unsrat.ac.id¹; h_sabijono@unsrat.ac.id²;
steven.tangkuman@unsrat.ac.id³

Abstrak: Persediaan merupakan peralatan atau barang yang terdapat dalam suatu instansi pemerintah yang digunakan untuk menunjang suatu instansi atau diserahkan sebagai layanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan perlakuan akuntansi persediaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara sudah sesuai dengan PSAP No. 5. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu menganalisis penerapan perlakuan akuntansi persediaan berupa wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara, dan membandingkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perlakuan akuntansi persediaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara sudah sesuai dengan PSAP No. 5. Dapat dilihat dari segi klasifikasi, pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian, dan beban persediaan semuanya sudah sesuai dengan PSAP No.5.

Kata kunci: Akuntansi Pemerintahan, Akuntansi Persediaan, PSAP No. 05

Abstract: Inventory is equipment or goods contained in a government agency that is used to support an agency or submitted as a service to the community. This study aims to determine whether the application of inventory accounting treatment at the Health Office of North Minahasa Regency is in accordance with PSAP No. 5. This study uses a descriptive qualitative method, which analyzes the application of inventory accounting treatment in the form of interviews and secondary data obtained from the Health Office of North Minahasa Regency, and compares it with the Statement of Government Accounting Standards No. 5. The results showed that the application of inventory accounting treatment at the Health Office of North Minahasa Regency was in accordance with PSAP No. 5. It can be seen in terms of classification, recognition, measurement, disclosure and presentation, and inventory expenses, all of which are in accordance with PSAP No.5.

Keywords : System and procedure, cash disbursement, money supply

PENDAHULUAN

Era reformasi sedang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia, mengubah sistem sosial, ekonomi, politik dan kemasyarakatan sehingga menimbulkan tuntutan yang berbeda pada pemerintah. Tuntutan itu diperluas seperti halnya di bidang teknologi dan setiap masyarakat diwajibkan untuk mengenal dan mengetahui bidang tersebut, dan tuntutan itu tidak dapat dihindari. Dalam menciptakan suatu sistem penataan pemerintahan yang baik, diperlukan reformasi di bidang akuntansi pemerintah, karena melalui proses akuntansi dapat menghasilkan informasi keuangan untuk digunakan berbagai pihak sesuai dengan tujuan masing-masing.

Dimana persediaan merupakan aset lancar yang berupa perlengkapan atau barang yang digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan operasional pemerintah, kemudian barang tersebut dijual dan/atau diserahkan sebagai pelayanan ke masyarakat. Dalam neraca maupun laporan rugi/laba persediaan merupakan hal yang sangat dibutuhkan karena tidak akan dapat disusun tanpa mengetahui persediaan, dan hal tersebut dapat dilihat dalam laporan keuangan. Mulai tahun 2015, baik pemerintah pusat maupun daerah sudah harus menerapkan peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi berbasis akrual. SAP berbasis akrual adalah yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam laporan keuangan yang berbasis akrual, juga yang mengakui belanja, pendapatan, dan pembelanjaan dalam laporan pelaksanaan

anggaran berdasarkan basis yang telah ditetapkan dalam APBN/APBD.

Persediaan diibaratkan seperti urat nadi dalam perusahaan manufaktur, organisasi bisnis, dagang, dan instansi di bidang pelayanan pemerintah juga masuk dalam aset lancar. Dalam upaya menyampaikan atau memberikan pelayanan publik harus dilakukan pengukuran dalam kinerja sektor publik yang membantu pemerintah untuk berfokus pada tujuan dan sarannya, membantu memperbaiki kinerja pemerintahan yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas organisasi sektor publik dan meningkatkan efisiensi untuk menyampaikan atau memberikan pelayanan publik. Persediaan meliputi perlengkapan atau barang yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor dan persediaan obat-obatan. Tanpa adanya persediaan akan menghambat instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan wilayah pemerintahan yang begitu luas.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah mengenai Persediaan pada bagian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 5 sehingga penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapan perlakuan akuntansi terhadap persediaan dalam menyajikan laporan keuangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara. Karena persediaan memiliki peranan penting dalam segi anggaran untuk kegiatan operasional apakah dalam penerapannya sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 5 tentang persediaan. Dari uraian yang telah dijelaskan tersebut penulis mengambil judul yaitu "Evaluasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Persediaan PSAP No. 5 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara."

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data yang dikumpulkan dari hasil wawancara langsung dengan pihak kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara dan diperoleh jawaban dari permasalahan mengenai penerapan perlakuan akuntansi persediaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara sesuai PSAP No. 5 dan kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, Jl. Rap-Rap, Kec. Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Waktu pelaksanaan dimulai dari bulan Januari 2022 sampai selesai.

3. Jenis, Sumber, dan Pengumpulan Data

Jenis Data adalah kumpulan fakta-fakta yang didapatkan dari hasil penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan, meringkaskan situasi, atau berbagai kondisi/fenomena tertentu.

Sumber Data yang digunakan penelitian ini adalah data primer yang bersumber langsung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara. Dan data sekunder merupakan data yang diperoleh atau didapatkan melalui perantara, seperti yang didapatkan dari berbagai dokumen yang resmi.

Pengumpulan Data penelitian dilakukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati langsung tempat penelitian yang akan diteliti, disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap suatu keadaan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara peneliti untuk berkomunikasi secara tatap muka untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan cara menyalin dan mencatat data-data atau arsip-arsip yang didapatkan instansi berupa data sistem pembelian barang dan persediaan untuk mengumpulkan data-data dari objek penelitian yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

4. Metode dan Proses Analisis

Metode Analisis Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan analisis deskriptif. Penelitian ini mempelajari tata cara dan juga menganalisis penerapan perlakuan akuntansi persediaan,

apakah sudah sesuai dengan PSAP No. 5.

Proses Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Tahap yang pertama, yaitu Apakah penerapan perlakuan akuntansi persediaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara sudah sesuai PSAP No.5.
- b. Tahap yang kedua, yaitu Pengumpulan Data (Wawancara dan dokumentasi mengenai penerapan perlakuan akuntansi persediaan PSAP No. 5).
- c. Tahap yang ketiga, yaitu Menganalisis dan Mengolah Data (Evaluasi data penerapan perlakuan akuntansi persediaan kemudian mencocokkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.5).
- d. Tahap yang keempat, yaitu Penyajian Data (Bentuk penyajian laporan berupa naratif, analitik dan logis yang merujuk pada kesimpulan).
- e. Tahap yang kelima, yaitu Menarik Kesimpulan dan Saran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Klasifikasi Persediaan

Terdapat pengklasifikasian persediaan, yaitu: persediaan obat-obatan dan persediaan alat tulis kantor. Dalam pengelolaan persediaan obat-obatan dikelola langsung oleh instalasi farmasi dan untuk alat tulis kantor dikelola sendiri oleh kantor dinas kesehatan. Dalam membuat perencanaan anggaran persediaan harus sesuai dengan kebutuhan yang akan diperlukan dalam satu tahun berjalan. Dan dalam perencanaannya dibuat berdasarkan perencanaan persediaan tahun sebelumnya. Adapun juga tujuan dilakukan persediaan untuk mengetahui mengevaluasi total pemakaian tahunan, dan buat berjaga-jaga atau mengantisipasi bencana yang tidak terduga.

Tabel 1. Persediaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara

Jenis Persediaan	Jumlah (Rp)
Obat-obatan	5.927.865.143
Alat Tulis Kantor	1.412.750

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara

2. Pengakuan Persediaan

Dalam mengakui persediaan saat sudah benar diterima bersama kelengkapan dokumen-dokumen seperti pada obat-obatan, tetapi harus dilakukan perencanaan anggaran terlebih dahulu untuk satu tahun ke depan. Pengadaan persediaan dimulai dari rencana kebutuhan obat kemudian diinput ke E-Monev (aplikasi pengimputan data RKO dari setiap puskesmas untuk diteruskan atau dikirim langsung ke Kementerian Kesehatan) dan diteruskan ke e-katalog (aplikasi pengadaan atau pemesanan barang atau obat-obatan yang diperlukan). Pengadaan ATK, melakukan kontrak kerja dengan penyedia barang, lalu ketika barang diterima akan dilakukan pembayaran, kemudian akan dicatat dalam kartu barang dan pada buku penerimaan barang. Dalam melakukan pengeluaran barang pada harus dicatat buku pengeluaran barang atau kartu barang dan mengeluarkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

3. Pengukuran Persediaan

Dalam melakukan pengadaan obat-obatan dapat diperoleh dengan pembelian yang sudah terinci dalam e-katalog (*e-purchasing*). Jika obat-obatan tidak tersedia di e-katalog maka dinas dapat membelinya di luar. Adapun juga permintaan yang langsung ditujukan ke provinsi, seperti vaksin Covid-19. Dalam pembelian obat-obatan mengikuti pembelian harga terakhir, walaupun dalam satu tahun berjalan berbeda-beda harga. Seperti satu item dengan tiga kali pengadaan dengan tiga harga yang berbeda tetap memakai harga pengadaan

yang terakhir. Persediaan obat-obatan dapat dinilai menggunakan metode *FIFO (First In First Out)* mengeluarkan barang dari persediaan dengan barang yang pertama masuk itu yang akan dikeluarkan terlebih dahulu. Misalnya tahun lalu pengadaan obat dari indofarma memiliki sisa obat CTM, dan tahun ini pengadaan dari kimia farma. Dengan menggunakan metode *FIFO*, yang pertama kali masuk itu yang akan dikeluarkan terlebih dahulu.

Tabel 2. Kartu Stok Obat-obatan

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
INSTALASI FARMASI
KARTU STOCK

Nama Obat : Amoxicillin 500mg

Expired Date :

Tgl	Diterima/ Disalurkan	Stok Awal	Masuk	Keluar	Sisa
Jan		212.000			212000
2020	Airmadidi			2.000	
	Kema			5.000	
	Wori			5.000	
	Mubune			5.000	
	Baksos			700	
	Up			100	194.200
				17800	
Feb	Kolongan			10.000	
2020	Airmadidi			5.000	
	Kauditani			10.000	
	Kema			8.000	
	Talawaan			5.000	
	Wori			5.000	
	Tatelu			3.000	
	Batu			5.000	
	Likupang			5.000	
	Mubune			8.000	
	Up			200	
				64.200	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara

4. Pengungkapan dan Penyajian Persediaan

Mengungkapkan laporan persediaan *stock opname* per bulan, per triwulan, per enam bulan dan pertahun. Pengungkapan *stock opname* per bulan untuk menyesuaikan catatan pembukuan dan stok fisik yang disimpan perusahaan, dan juga untuk mengatur mutasi/pengeluaran barang dari dan keluar perusahaan. Dalam mengungkapkan persediaan disampaikan oleh seorang pengurus barang ke kepala dinas. Berita acara dibuat langsung oleh bendahara barang dan persediaan.

5. Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Perhitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional. Persediaan dicatat menggunakan metode periodik, yaitu pencatatannya dilakukan saat terdapat penambahan dan akibatnya persediaan tidak diperbarui. Inventarisasi dilakukan diakhir periode, sehingga dapat diketahui jumlah inventarisnya. Pencatatan inventaris diperlukan untuk sekretariat.

Pembahasan

1. Klasifikasi Persediaan

Klasifikasi persediaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara terbagi atas dua persediaan, yaitu: Alat Tulis Kantor dan Obat-obatan.

2. Pengakuan Persediaan

Pengakuan persediaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara mengakui saat barang tersebut sudah diterima beserta kelengkapan dokumen-dokumennya, seperti adanya berita acara stock opname dan juga memiliki bukti dokumen yang bisa diukur secara andal, jujur dan dapat diverifikasi.

3. Pengukuran Persediaan

Pengukuran persediaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara menggunakan metode *FIFO (First In First Out)* dimana barang yang masuk pertama itulah yang akan dikeluarkan terlebih dahulu. Metode tersebut bisa mengurangi risiko kerusakan atau keusangan pada barang.

4. Pengungkapan dan Penyajian Persediaan

Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara dalam mengungkapkan persediaan barang yang masuk dan keluar langsung dicatat atau dimasukkan dalam buku barang persediaan. Dinas kesehatan juga mengungkapkan barang yang digunakan dalam pelayanan masyarakat atau barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Dalam menyajikan laporan persediaan di neraca, dilakukan inventarisasi fisik (*stock opname*) persediaan per bulan, per triwulan, per enam bulan dan per tahun dan dari hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) akan dilakukan penyesuaian dengan data persediaan.

5. Beban Persediaan

Menurut Permendagri No. 64 Tahun 2013, sistem akuntansi persediaan mempunyai dua metode, yaitu metode periodik dan metode perpetual. Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara, yang digunakan dalam beban persediaan adalah metode periodik yaitu pencatatannya yang dilakukan saat terjadinya penambahan atau transaksi. Biaya persediaan atau beban persediaan dicatat saat persediaan digunakan, hal tersebut berdasarkan PSAP No. 5 tentang persediaan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan kesimpulan bahwa Penerapan perlakuan akuntansi persediaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara sudah sesuai dengan PSAP No. 5. Dapat dilihat dari klasifikasi persediaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara terbagi atas alat tulis kantor dan persediaan obat-obatan. Pengakuan persediaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara mengakui saat barang benar diterima beserta dengan kelengkapan dokumennya dan sesuai dengan permintaan yang dipesan. Pengukuran persediaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara menggunakan metode FIFO, agar menghindari keusangan atau kerusakan pada barang persediaan. Pengungkapan dan penyajian persediaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara, menyajikan persediaan dalam laporan keuangan secara merinci.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, A. D. Q. (2019). Perlakuan akuntansi persediaan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan pada Dinas Kesehatan Kota Batu (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Hendri, W., Mariati, M., & Tamsil, T. (2020). Penerapan Psap 05 Tentang Akuntansi Persediaan Pada Kantor Inspektorat Kab. Bantaeng. *Accounting Journal*, 1(1), 305-312.
- Ismail, Y. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2021). Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (Psap) Nomor 05 Tentang Akuntansi Persediaan Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 16(3), 248-257.
- Massie, J. B. (2016). Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Langsung Dan Beban Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(2).
- Mile, A. W. S., & Suwetja, I. G. (2022). Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 05 Tentang Akuntansi Persediaan Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 323-328.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pernyataan Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan. Pemerintah
- Rifai, R. P., & Tinangon, J. J. (2017). Evaluasi Kebijakan Akuntansi Dalam Pengukuran Persediaan Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 Tentang Akuntansi Persediaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(1).
- Sembiring, E. A. (2019). Pengaruh Metode Pencatatan Persediaan Dengan Sistem Periodik Dan Perpetual Berbasis Sia Terhadap Stock Opname Pada Perusahaan Dagang Di Pt Jasum Jaya. *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition)*, 1(1), 69-77.
- Tompodung, G., Sondakh, J. J., & Kalalo, M. (2021). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 16(3), 209-216.
- Umboh, A. D., & Tinangon, J. J. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Persediaan Psap No. 5 Pada Dinas Kesehatan Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(2).
- Waworega, A. A., Manossoh, H., & Tangkuman, S. J. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).